

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian implementasi

Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna

Pengertian implementasi menjelaskan bahwa implementasi itu bukan sekedar aktivitas saja, tetapi juga kegiatan terencana yang dilakukan dengan sungguh sungguh berdasarkan acuan yang direncanakan dengan sungguh sungguh oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek yaitu terlaksananya suatu program. Implementasi juga mempunyai proses pelaksanaan keputusan dasar, sebagai berikut;

Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundang undang.

Proses persiapan implementasi menyangkut beberapa hal penting yakni Penyiapan sumber daya, unit dan metode, Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan

arahan yang dapat diterima dan dijalankan, Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lainnya juga.

2.2 Implementasi kebijakan publik

Kebijakan publik, dilihat dari perspektif instrumental, adalah alat untuk mencapai suatu tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintahan mewujudkan nilai nilai kepublikan (*public values*). Nilai nilai kepublikan sebagai tujuan kebijakan tersebut dapat memiliki wujud bermacam macam. namun demikian secara umum kebijakan publik adalah alat untuk mewujudkan nilai nilai yang di idealkan masyarakat seperti keadilan, persamaan, dan keterbukaan. memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat misalnya kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan pelayanan publik memanfaatkan peluang baru bagi kehidupan yang baik bagi masyarakat seperti mendorong investasi dan inovasi pelayanan¹

Keberhasilan implementasi kebijakan publik memerlukan pendekatan *top-down* dan *bottomup* sekaligus. pendekatan top-down terutama berfokus pada ketersediaan unit pelaksana (birokrasi), standar pelaksanaan, kewenangan, koordinasi, dan lain lain. Pendekatam *bottom up* menekankan pada strategis yang digunakan oleh pelaksanaan saat menentukan tujuan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan public sebagai dasar untuk memahami kebijakan publik itu secara keseluruhan. Menurut Grindle keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai

¹ Purwanto, Agus. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Gava Media. Hal. 64.

atau tidaknya tujuan yang ingin diraih, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu:

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakan.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua factor.²

Keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat tergantung pada keberhasilan publik itu, karena pada akhirnya actor itulah yang akan melaksanakan apapun kebijakan publik yang dibuat karena itu, sejak tahapan formulasi kebijakan publik sudah harus diketahui secara pasti siapa yang berkepentingan, bagaimana interaksi antara actor terbentuk, serta strategis yang digunakan untuk pencapaian kepentingan itu³

Proses kegiatan ini disertai dengan tindakan-tindakan yang bersifat alokatif, yaitu tindakan yang menggunakan 25 Proses Implementasi Kebijakan Publik masukkan sumber daya yang berupa uang, waktu, personil, dan alat. fungsi dan tujuan implementasi ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik (politik) dapat diwujudkan sebagai “*outcome*” (hasil akhir) dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Implementasi dapat disebut sebagai “*policy delivery system*”. Maksudnya,

² Afri,selamet *Implementasi Kebijakan Rebijakan Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Blora*(Studi Kasus Pasar Blora Kota).

³ Saefullah Djadja.2006.*Implementasi Kebijakan Publik*. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung.hal

sebagai suatu sistem penyampaian atau penerusan kebijakan. Sebagai suatu sistem, implementasi terdiri dari unsur-unsur dan kegiatan-kegiatan yang terarah menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki.⁴ Actor implementasi kebijakan adalah birokrasi sebagai tangan pemerintah. Oleh karena itu implementasi menganggap bahwa pemerintah mempunyai segalanya untuk mengolah kehidupan publik.

2.3 Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan sebagainya) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan” (menurut Laporan Brundtland dari PBB, 1987). Pembangunan berkelanjutan adalah terjemahan dari Bahasa Inggris, *sustainable development*. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.⁵ Menurut budimanta pembangunan berkelanjutan adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang

⁴*Ibid*, hal 26

⁵ Sumber: <https://law.ui.ac.id/v3/profil/fasilitas/pembangunan-berkelanjutan/> di akses pada tanggal; 14 desember 2021

Tomorrow's Generation Today's Generation North untuk menikmati dan memanfaatkannya⁶ Awal munculnya konsep pembangunan berkelanjutan adalah karena perhatian kepada lingkungan. Terutama sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui sedang eksploitasi terhadapnya dilakukan terus menerus. Pengertian dari tidak mengurangi dan mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang adalah pembangunan yang dilakukan dimasa sekarang itu jangan sampai merusak lingkungan, boros terhadap sumber daya alam dan juga memperhatikan generasi yang akan datang. Generasi yang akan datang juga jangan terlalu dimanjakan dengan tersedianya semua fasilitas. Tetapi mereka juga harus di beri kesempatan untuk berekspresi menuangkan ide kreatifnya untuk mengolah dan mengembangkan alam dan pembangunan.

2.4 Sustainable Development Goals (SDGs)

SDGs merupakan seperangkat tujuan, sasaran, dan indikator SDGs dapat diaplikasikan untuk mengukur realitas pembangunan, baik pada tingkat global, regional, nasional, daerah, bahkan ke tingkat desa. Secara eksplisit, tujuan SDGs dimaksudkan untuk memobilisasi pembangunan yang merah pada terjadinya kemajuan, khususnya dalam usaha mengakhiri segala bentuk kemiskinan dan kelaparan di manapun, mengurangi kesenjangan dalam dan antar Negara, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta mengambil langkah strategis untuk perubahan iklim.

⁶M.zaini dan Agus Tri Darmawanto, ‘‘ Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Studi Pada Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda’’, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, Vol. 15, No 2 November 2015,

Sustainable Development goals (SDGs, atau di indonesiakan menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan/TPB) berposisi mengisi segenap kebutuhan tersebut. konsep SDGs mengabungkan seluruh konsep pembangunan yang pernah disusun manusia, sebagai konferensi tingkat tinggi yang diselenggarakan perserikatan bangsa bangsa (PBB) selama ini pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, resiliensi terhadap bencana, kependudukan, dan sebagainya, SDGs memenuhi kebutuhan akan detail pembangunan yang lebih sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Adapun tujuan SDGs terdiri atas 17 tujuan yaitu:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih dan mendukung pertanian berkelanjutan
3. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia
4. Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan
6. Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitas bagi semua
7. Memastikan akses terhadap energy yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua

8. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi
10. Mengurangi ketimpangan didalam dan antara Negara
11. Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan
12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
13. Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya
14. Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritime untuk pembangunan yang berkelanjutan
15. Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan) dan menghambat dan membalikan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati
16. Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level
17. Memperkuat ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.⁷

⁷ <https://www.sdg2030indonesia.org/page/1-tujuan-sdg> diakses pada 27 oktober 2021

Dalam perpres 59/2017, pengajawantahannya pada level nasional Indonesia membengkok menjadi 319 indikator dalam cakupan 17 tujuan.⁸ Secara eksplisit, tujuan SDGs dimaksudkan untuk memobilisasi pembangunan yang mengarah pada terjadinya kemajuan, khususnya dalam usaha mengakhiri segala bentuk kemiskinan dan kelaparan dimanapun, mengurangi kesenjangan dalam dan antar negara, menjadi kelestarian lingkungan hidup, serta mengambil langkah strategis untuk perubahan iklim.

Hal tersebut tergambar dalam 4 pilar sebagai berikut. Ada 4 pilar SDGs yang terkait satu sama lain sebagai berikut:

1. Pilar sosial adalah untuk mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak dasar manusia secara berkualitas, adil, setara, serta peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat
2. Pilar ekonomi adalah yang memberikan jalan bagi pembangunan untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan
3. Pilar lingkungan adalah pertumbuhan ekonomi terciptakan untuk memenuhi hak dasar manusia, dicapai dari pengolahan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan demi terpenuhinya kebutuhan generasi yang akan datang.
4. Pilar hukum dan tata kelola yang dapat memberikan kepastian hukum dan terwujudnya tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan

⁸*IBid.* Hal.63.

partisipatif, untuk terciptanya stabilitas keamanan sebagai prasyarat pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.⁹

Sustainable Development Goals (SDGs) Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam bahasa kerennya *Sustainable Development Goals* disingkat SDGs. *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa merupakan role pembangunan berkelanjutan yang akan masuk dalam program prioritas penggunaan Dana Desa Tahun yang akan datang. Dan Salah satu tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah untuk menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) ini terdapat di Goal 16 yang terkait pada Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tanggu. Pada tingkat global terdapat 8 sasaran, yang kemudian dalam Perpres No 59 Tahun 2017 dikembangkan menjadi 20 sasaran nasional, karena disesuaikan dengan RPJMN 2015 – 2019. perpres 59/2017 menjulukan tujuan pembangunan berkelanjutan tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan wujud komitmen pemerintah Indonesia¹⁰, untuk menjadi bagian dari aksi bersama masyarakat global dalam mendorong pembangunan

⁹*Ibid.* Hal.100.

¹⁰ *Ibid* 101

berkelanjutan guna mengatasi kemiskinan, kelaparan, kesenjangan, pendidikan, serta perubahan iklim.

Proses perumusan *Sustainable Development Goals* (SDGs) tidak lepas dari aspirasi dan inspirasi dari pemerintah daerah. Melalui asosiasi kota dan pemerintah daerah di tingkat global, pemerintah daerah telah sangat aktif ikut andil dalam perumusan dan pengesahan SDGs. Maka, bagi pemerintah daerah, “*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah kita”. Sangat wajar dan layak bila peran desa menjadi sangat peran penting untuk melanjutkan pencapaian berkelanjutan di tahun 2021 saat ini.

2.5 Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)

Ke-18 (delapan belas) Tujuan Global (Global Goals) dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) tersebut yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan. Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia dan ikon tabungan jago menunjukkan kekhasan warga desa untuk menakhiri kemiskinan dengan memulai tabungan meskipun ditabung di dalam rumah.
2. Tanpa Kelaparan. Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan dan terlihat juga dari bakul nasi menandai terbebasnya warga menjadi persentase pengeluaran terbesar keluarga keluarga di desa saat ini.

3. Desa sehat dan sejahtera. Menjamin kehidupan warga desa yang sehat serta demi mewujudkan kesesejahteraan dan mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di desa.
4. Pendidikan Berkualitas. Pendidikan merupakan bentuk investasi yang menentukan masa depan bangsa.pendidikan menjadi syarat peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) desa. Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5. Keterlibatan perempuan desa. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan. Tujuan ini juga adalah tersediannya ruang dan kesemoatan bagi keterlibatan perempuan dalam pemerintahan, baik sebagai aparatur desa maupun dalam perwakilan desa (BPD).
6. Desa layak Air Bersih dan Sanitasi.kebutuhan dasar manusia. Pemenuhan air bersih dan sanita yang layak masih menjadi problem di desa oleh karena itu pemenuhan atas kebutuhan air bersih menjadi jaminan terhadap pembangunan berkelanjutan ketersediaan air bersih dan sanitasi di desa.
7. Desa berenergi Bersih dan Terbarukan. Energy adalah penggerak perekonomian dan prasyarat dalam pembangunan. Oleh kerena itu tujuan ini untuk memastikan semua orang memiliki akses terhadap energy

terbarukan Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.

8. Pertumbuhan Ekonomi desa merata. Menghadapi pandemic covid-19, ekonomi Indonesia dan bahkan dunia menghadapi tantangan yang sangat berat dengan itu pembangunan berkelanjutan sangat Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.
9. Insfratraktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan. untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif, maka keandalan infrastruktur desa sangat menentukan,mulai jalan desa, maupun infrastruktur lainnya dan SDGs juga menekannya lahir inovasi di desa dalam semua bidang, seperti ekonomi, pelayanan public dan lain lainnya. Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.
10. Desa tanpa Kesenjangan. Mengurangi ketidaksetaraan dan menghilangkan kesenjangan tersebut baik di dalam sebuah negara maupun di antara Negara negara di dunia. Capaian ini juga diukur dengan koefisien gini desa; tingkat kemiskinan di desa, status perkembangan desa; serta indeks kebebasan sipil di desa.
11. Kawasan pemukiman desa aman dan nyaman. Pemukiman adalah kebutuhan dasar manusia yang harus di penuhi, agar manusia dapat menjalankan fungsi fungsi social dan ekonomi di tengah tengah masyarakat.kebutuhan pemukiman layak huni dengan harga terjangkau

sering kali tidak diimbang dengan ketersediaan pemukiman yang memenuhi standar sarana prasarana yang dibutuhkan seperti ruang terbuka hijau, lapangan olahraga, dan tempat usaha. Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan.

12. Konsumsi dan Produksi desa sadar lingkungan. Upaya mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan terhadap bumi melalui pola produksi dan konsumen yang sewajarnya. Indikator ini dapat dilihat dari kebijakan desa yang mengatur tentang pengelolaan limbah dunia usaha, penggunaan sumber daya alam, dan pengolahan sampah rumah tangga. Bertindak cepat untuk memerangi dampaknya.
13. Desa tanggap perubahan iklim. Indikator ini bertujuan untuk membantu pengurangan dampak perubahan iklim global, dengan beberapa program yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Keberhasilan pencapaian tujuan ini dapat dilihat dari beberapa indikator, salah satunya dengan indeks risiko bencana di desa.
14. Desa peduli lingkungan laut. Indikator ini untuk melindungi pantai dan lautan. Untuk mengukur keberhasilan capaian tujuan ini, digunakan beberapa indikator sebagai berikut; terjadinya peningkatan penangkapan ikan secara wajar, serta tidak terjadinya *illegal fishing*.
15. Desa peduli lingkungan darat. Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling

tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati

16. Desa damai berkeadilan. Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Kemitraan untuk Membangun desa. Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan dan untuk mengukur tercapainya tujuan ini digunakan beberapa indikator capaian diantaranya keberadaan dan bentuk kerja sama desa dengan pihak ketiga, ketersediaan jaringan internet di desa statistic desa serta komoditas dan aktivitas ekspor oleh desa.
18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Kelembagaan desa merupakan komponen yang sangat vital untuk mendorong keberlanjutan pembangunan, karena itulah, keberadaan kelembagaan desa harus di perkuat sehingga dapat menopang pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.¹¹

Indikator ini bertujuan untuk mengukur level desa, agar data data desa yang dikumpulkan bisa diolah untuk pembangunan level desa, sekaligus diakumulasi menjadi indikator daerah dan nasional di indonsesia ketiadaan indikator konteks pembangunan berupa kondisi perdesaan itu.

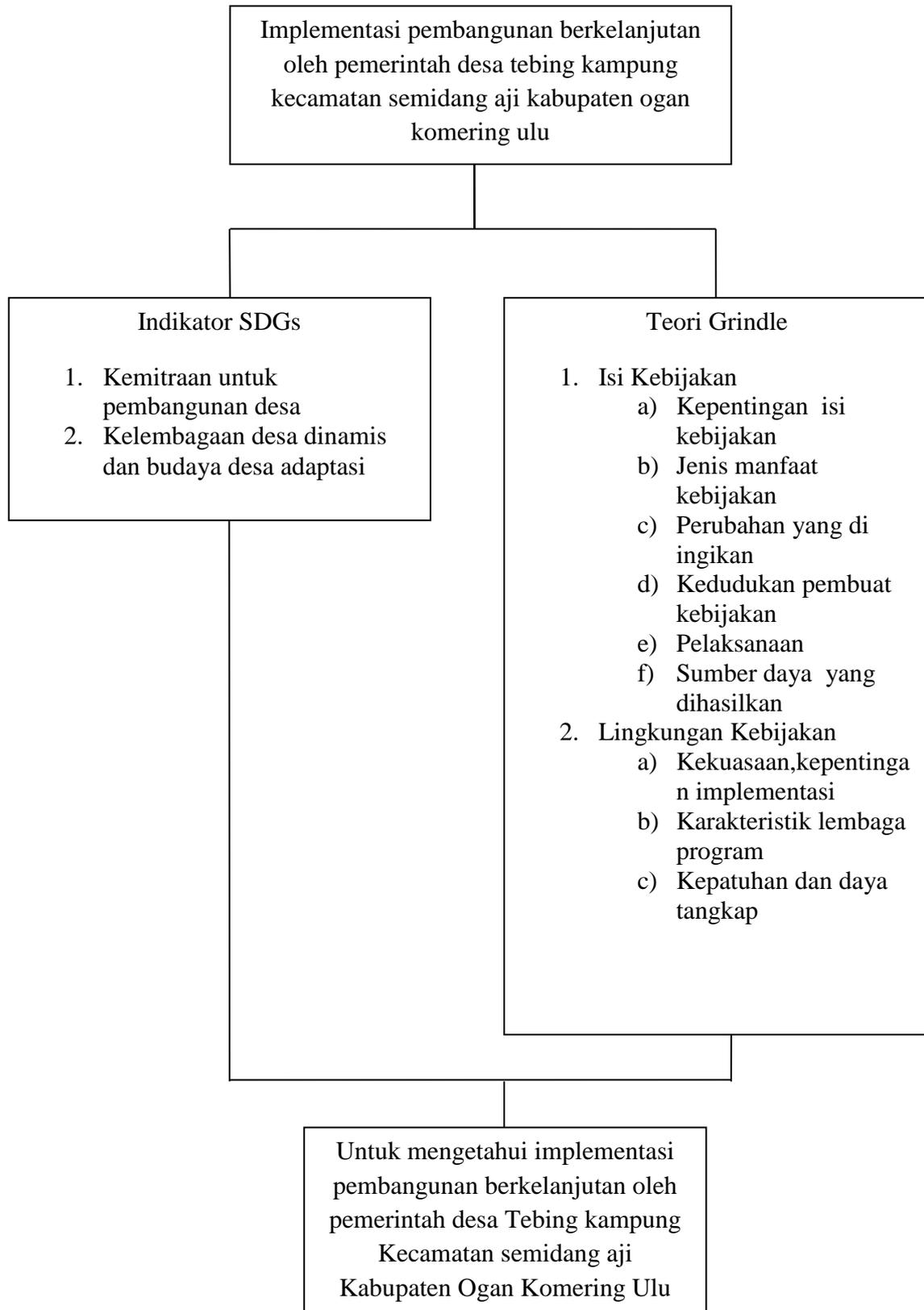
¹¹ *IBId.hal.109*

2.6 Pemerintahan Desa

Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. pemerintah desa termasuk salah satu perangkat pemerintah daerah, pemerintah desa di atur dalam undang undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dan peraturan Pemerintah daerah. Keduanya mengatur penyelenggaraan Pemerintah Desa, salah satunya adalah lembaga-lembaga penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa tentunya memiliki Tugas, Fungsi dan wewenang yang telah di atur dalam regulasi,yang tertuang dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah Desa Yang di maksud adalah kepala desa atau yang di sebut dengan Nama lain yang di bantu oleh perangkat desa atau yang di sebut nama lain. Adapun beberapa kewenangan yang melekat pada pemerintah desa adalah memegang Kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina ketentraman masyarakat desa

2.7 Kerangka berpikir



2.8 Penelitian Terdahulu

Guna mendukung penelaahan yang lebih komprehensif, sehingga diperlukan penelitian–penelitian terdahulu yang relevan terhadap topik penelitian ini. Telaah pustaka ini dilakukan peneliti ditujukan agar mengetahui seberapa banyak penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini dengan penelitian penelitian sebelumnya. Sumber sumber yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Jurnal Arifudin ahmad tentang analisa kebutuhan air bersih di kecamatan sedate kabupaten sidoarjo terkait capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030. Hasil analisis atau hasil kesimpulan penelitian tentang kebutuhan air bersih di kecamatan sedate kabupaten sidoarjo terkait tercapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah masih Besarnya kebutuhan air bersih total daerah pelayanan Kecamatan Sedati pada tahun 2030 menurut jumlah penduduk sebesar 17.281.512 L/hari/orang, Besarnya kebutuhan air bersih total daerah pelayanan Kecamatan Sedati pada tahun 2030 menurut prediksi masing-masing jenis pelanggan sebesar 4.430.250 L/hari/orang dan Terkait dengan SDGs 2030, Kebutuhan air bersih pada daerah pelayanan Kecamatan Sedati telah mencukupi untuk program SDGs 2030 mendatang.¹²
2. Penelitian terdahulu mengenai *Sustainable Development Goals* pernah dilakukan oleh Ishartono & Santoso Tri Raharjo, berjudul “Sustainable Development Goals (SDGs) & Pengentasan Kemiskinan” yang diterbitkan

¹² Ahmad. 2021. analisa kebutuhan air bersih di kecamatan sedate kabupaten sidoarjo terkait capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030.

pada jurnal *Share Social Work Journal* tahun 2016. Penelitian tersebut berfokus kepada bagaimana Program SDGs di pada poin pertama yaitu tanpa kemiskinan, yang dimana tujuan tersebut menjadi solusi dalam mengakhiri kemiskinan yang terjadi di Indonesia, karena kemiskinan di Indonesia menjadi persoalan yang berat serta menjelaskan tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia.¹³

3. Jurnal Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan oleh Abdul Haris Romdhoni, menganalisis secara empiris apakah zakat memiliki dampak pada upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Hasil analisis menunjukkan zakat dapat mengurangi jumlah dan persentase keluarga miskin dan penyediaan modal produktif zakat dalam bentuk modal usaha memiliki dampak positif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Pengaruh positif antara pemanfaatan produktif zakat program LAZ An-Naafi' Boyolali terhadap pendapatan mustahiq dipengaruhi oleh pemanfaatan zakat produktif yang kontribusi sebesar 30,5%. Hal ini terlihat dari perkembangan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan mustahiq setelah mengikuti program pemberdayaan zakat produktif LAZ An-Naafi ' Boyolali yang juga dapat digunakan untuk modal ventura¹⁴

¹³ Sumber : <http://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/13198> di akses pada tanggal 18 november 2021

¹⁴ Abdul Haris Romdhoni, "Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03, No. 01, Tahun MMXVII (Maret 2017).